

ANALISA YURIDIS CALON TUNGGAL PILKADA LANGSUNG DALAM IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Kiki Atika Putri¹, Akhmad Munawar², Maksum³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810501

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1101087301

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1125086601

[Email:kikiatikaputri@gmail.com](mailto:kikiatikaputri@gmail.com)

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah guna memperoleh pemimpin daerah yang dapat melaksanakan kehendak rakyat di setiap daerah. Fokus utama penelitian Pengaturan Calon Tunggal dan Konsekuensi Yuridis calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber data penelitian ialah menggunakan data penelitian sekunder. Teknik pengumpulan data ialah Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode Analisis Kualitatif, selanjutnya data diuraikan secara Deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa persyaratan dengan ketentuan pada Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah dinilai mengakibatkan bakal pasangan calon tidak dapat memenuhi persyaratan tidak dapat maju menjadi calon pasangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga menjadi sebab terjadinya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Konsekuensi Yuridis adanya Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah apabila kotak kosong menjadi lawan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut menang.

Kata Kunci: Calon Tunggal;Kotak Kosong, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

Indonesia as a democratic country organizes regional head elections in order to obtain regional leaders who can carry out the will of the people in each region. The main focus of research on Single Candidate Regulations and the Juridical Consequences of a single candidate is in Law Number 8 of 2015 and Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws. This research is a Normative Law research. Legislative Approach and Case Approach. The research data source is using secondary research data. The data collection technique is Library Studies. The data obtained in the study were analyzed using the Qualitative Analysis method, then the data were described descriptively. The results of the study found that the requirements with the provisions in the Regional Head Election Law were considered to result in potential pairs of candidates not being able to fulfill the requirements unable to advance as potential partners in the Regional Head Elections. So that becomes the reason for the occurrence of a single candidate in the Regional Head Election. The juridical consequence of having a single candidate in the regional head election is if the empty box becomes the opponent of the single candidate in the regional head election.

Keywords: Blank Box; Regional Head Election; Single Candidate.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PU- XII/2015, Mahkamah Konstitusi, Tanggal 28 September 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUUXIII/2015, Mahkamah Konstitusi, Tanggal 28 September 2022